

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kesadaran Wajib Pajak Rendah

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Radar Bandung/ Hal. 3

Edisi : Rabu, 2 Mei 2018

Kesadaran Wajib Pajak Rendah

CIMAHI - Anggota DPRD Kota Cimahi Edi Kanedi mengajak masyarakat untuk taat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat melakukan reses di RT 1 Rw 21 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan.

Menurutnya, sejauh ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih rendah. Padahal, jika masyarakat memenuhi kewajibannya dengan baik maka, akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.

"Makanya saya berupaya mengajak masyarakat untuk taat membayar PBB," kata Edi, usai Reses, Senin (30/4).

Menurutnya, dalam upaya meningkatkan PAD dari PBB, Pemerintah Kota Cimahi bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak cukup hanya dengan pemberitahuan melalui spanduk ataupun iklan layanan masyarakat saja. Namun, langkah baiknya sosialisasi mengenai taat membayar pajak harus dilakukan dari bawah. Misalnya, melibatkan para ketua Rt/Rw di masing-masing daerah untuk menyampaikan langsung ke-

pada warganya.

"Intinya pemerintah jangan berhenti mengingatkan masyarakat untuk taat membayar pajak," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, tidak sedikit masyarakat yang beriskap acuh dengan kewajibannya ketika membayar pajak. Dengan begitu, menjadikan tunggakan yang berdampak pada menurunnya PAD dari bidang perpajakan khususnya PBB.

"Mereka kebanyakan menunda-nunda pembayaran. Kalau kebiasaan ini dibiarkan jelas akan memberatkan karena, semakin ditundanya pembayaran maka, semakin besar juga pembayarannya karena ditambah dengan denda," katanya.

Menanggapi keinginan masyarakat yang ingin denda atau tunggakan PBB diputihkan, ia tidak bisa serta merta melakukan hal tersebut sebab, membayar pajak itu sudah menjadi kewajiban masyarakat bahkan pejabat sekalipun.

"Jadi, mau tidak mau harus membayar. Toh sudah menjadi kewajiban kita semua. Saya harap kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewaji-

bannya ditingkatkan," tandasnya.

Sekitar 200 lebih warga yang hadir pada kegiatan reses tersebut, mereka ingin pendidikan gratis bisa direalisasikan di Kota Cimahi.

Mengenai pendidikan gratis yang diwacanakan oleh Walikota Cimahi Ajay M Priatna dengan membebaskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), menurut Edi, akan kesulitan untuk direalisasikan. Sebab, kalau hanya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1,2 triliun, tidak akan cukup.

"Saya rasa, tidak akan memadai kalau hanya memanfaatkan APBD. Apalagi ada 20 program prioritas lainnya yang juga harus direalisasikan," tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya akan menyampaikan sejumlah keinginan masyarakat tersebut kepada pihak eksekutif agar, dicarikan solusinya hingga bisa direalisasikan.

"Saya setuju dengan rencana dibebaskannya SPP namun, harus disesuaikan dengan kemampuan daerah," pungkasnya. (gat)